



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ali Murtopo Simbolon

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Airlangga Hartarto

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Menteri Koordinator Bidang  
Perekonomian

Pihak Pertama,  
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan  
dan Ekonomi Digital



**Airlangga Hartarto**



**Ali Murtopo Simbolon**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan	1.1	Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	8-9%
		1.2	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB	21,7%
		1.3	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	13,07%
2.	Terwujudnya Ekosistem Logistik Nasional yang Berkualitas	2.1	Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB	8,27%
		2.2	Rata-Rata Waktu Perputaran di Pelabuhan	1,7 Hari
3.	Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan	3.1	Indeks Literasi Keuangan	57,25
4.	Terwujudnya Kebijakan Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	4.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4 (Baik)
5.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4 (Baik)
6.	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	6.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	85%

**Kegiatan**

- Koordinasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga
- Koordinasi Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor
- Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional
- Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital
- Koordinasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan
- Peningkatan Layanan Koordinasi Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

**Anggaran**

Rp1.500.000.000,-  
Rp3.000.000.000,-  
Rp2.000.000.000,-  
Rp5.500.000.000,-  
Rp4.500.000.000,-  
Rp5.300.000.000,-

**Total**

**Rp21.800.000.000,-\***

(Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah)

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Menteri Koordinator Bidang  
Perekonomian

Pihak Pertama,  
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan  
dan Ekonomi Digital

  
Airlangga Hartarto

  
Ali Murtopo Simbolon



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN LOGISTIK NASIONAL  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pujo Setio

Jabatan : Plt. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ali Murtopo Simbolon

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan  
Ekonomi Digital

Pihak Pertama,  
Plt. Asisten Deputi  
Pengembangan Logistik Nasional

**Ali Murtopo Simbolon**

**Pujo Setio**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN LOGISTIK NASIONAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Sistem Logistik Nasional yang Berkualitas	1.1. Biaya Transportasi Logistik Angkutan Darat dan Laut terhadap PDB	3,58%
		1.2. Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok untuk Kegiatan Ekspor-Impor	1,3 – 1,8 (hari)
		1.3. Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Perak untuk Kegiatan Ekspor-Impor	1,3 – 1,8 (hari)
2	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional yang Berkualitas	2.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut	80%
		2.2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak	80%
3	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Logistik Nasional yang Berkualitas	3.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Logistik Nasional	3 dari 4 (Baik)
4	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional yang Berkualitas	4.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional	85%

**Kegiatan**

1. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional

**Total**

**Anggaran**

Rp. 2.000.000.000,-

**Rp. 2.000.000.000,-\***  
(Dua Miliar Rupiah)

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Koordinasi  
Perniagaan dan Ekonomi Digital

**Ali Murtopo Simbolon**

Pihak Pertama,  
Plt. Asisten Deputi Pengembangan  
Logistik Nasional

**Pujo Setio**



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL  
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Theodore Sutarto  
Jabatan : Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ali Murtopo Simbolon  
Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan dan  
Ekonomi Digital

**Ali Murtopo Simbolon**

Pihak Pertama,  
Asisten Deputy Pengembangan  
Ekonomi Digital

**Theodore Sutarto**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan	1.1. Jumlah Volume Transaksi <i>E-Commerce</i>	2,4 miliar Faktur Transaksi
		1.2 Persentase Penyelesaian <i>Legal Drafting</i> DEFA	100%
2	Terwujudnya Kebijakan Ekonomi Digital yang Berkualitas	2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekonomi Digital dalam konteks: Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi	80%
		2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Posisi Runding RI untuk DEFA	80%
3	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital yang Berkualitas	3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Digital	3 dari 4 (Baik)
4	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital yang Berkualitas	4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	85%

**Kegiatan**

1. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital

**Anggaran**

Rp 5.500.000.000

**Total**

Rp 5.500.000.000\*  
(Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan  
dan Ekonomi Digital

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Pengembangan  
Ekonomi Digital



**Ali Murtopo Simbolon**



**Theodore Sutarto**



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL  
SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pujo Setio

Jabatan : Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ali Murtopo Simbolon

Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan  
dan Ekonomi Digital

Pihak Pertama,  
Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi  
Perneragaan dan Ekonomi Digital

**Ali Murtopo Simbolon**

**Pujo Setio**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Perneragaan dan Ekonomi Digital yang Baik	1.1	Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital	100%
		1.2	Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital	100%
		1.3	Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital	100%
		1.4	Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital	100%
		1.5	Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputy	100%
		1.6	Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital	85%
		1.7	Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4

**Kegiatan**

1. Peningkatan Layanan Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital

**Total**

**Anggaran**

Rp. 5.300.000.000,-

**Rp. 5.300.000.000,-\***

(Lima Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah)

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital



**Ali Murtopo Simbolon**

Pihak Pertama,  
Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital



**Pujo Setio**



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL  
ASISTEN DEPUTI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN  
TERTIB NIAGA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ismariny

Jabatan : Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ali Murtopo Simbolon

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan  
dan Ekonomi Digital

**Ali Murtopo Simbolon**

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Perdagangan Dalam  
Negeri, Perlindungan Konsumen dan  
Tertib Niaga

**Ismariny**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**ASISTEN DEPUTI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN**  
**TERTIB NIAGA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan Dalam Negeri	1.1	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Sumatera	12,10%
		1.2	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Jawa	13,31%
2.	Terwujudnya Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang Berkualitas	2.1	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Ritel	80%
		2.2	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan	80%
3.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang Berkualitas	3.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga	3 dari 4
4.	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga yang Berkualitas	4.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga	85%

**Kegiatan**

1. Koordinasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

**Total**

**Anggaran**

Rp. 1.500.000.000,-

**Rp. 1.500.000.000,-\***

(Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)

Pihak kedua,  
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan  
dan Ekonomi Digital



**Ali Murtopo Simbolon**

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Perdagangan Dalam  
Negeri, Perlindungan Konsumen dan  
Tertib Niaga



**Ismariny**



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL  
ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN INKLUSI KEUANGAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erdiriyo  
Jabatan : Asisten Deputy Peningkatan Inklusi Keuangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ali Murtopo Simbolon  
Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak kedua,  
Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan  
dan Ekonomi Digital

Pihak Pertama,  
Asisten Deputy Peningkatan Inklusi  
Keuangan

**Ali Murtopo Simbolon**

**Erdiriyo**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN INKLUSI KEUANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan	1.1	Tingkat Literasi Keuangan Konvensional	57%
		1.2	Tingkat Literasi Keuangan Syariah	39%
2.	Terwujudnya Kebijakan Inklusi dan Literasi Keuangan yang Berkualitas	2.1	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan	80%
		2.2	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Intensifikasi, Literasi, dan Akselerasi Produk Keuangan Syariah	80%
3.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas	3.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan	3 dari 4 (Baik)
4.	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas	4.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan	85%

**Kegiatan**

1. Koordinasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan

**Total**

**Anggaran**

Rp. 4.500.000.000,-

**Rp. 4.500.000.000,-\***

(Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)

Pihak kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital,

**Ali Murtopo Simbolon**

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan

**Erdiriyo**



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL  
ASISTEN DEPUTI FASILITASI PERDAGANGAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ekko Harjanto

Jabatan : Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ali Murtopo Simbolon

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Perneragaan dan Ekonomi Digital

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Koordinasi Perneragaan  
dan Ekonomi Digital

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan  
dan Pengembangan Ekspor

**Ali Murtopo Simbolon**

**Ekko Harjanto**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**ASISTEN DEPUTI FASILITASI PERDAGANGAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Penguatan Nilai Perdagangan Internasional	1.1	Nilai Ekspor Barang Nasional	USD 276,89 Milliar
2.	Terwujudnya Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas	2.1	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengembangan Ekspor	80%
		2.2	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Pengendalian Impor	80%
		2.3	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Penyederhanaan Prosedur Perdagangan	80%
3.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas	3.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	3 dari 4 (Baik)
4.	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas	4.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	85%

**Kegiatan**

1. Koordinasi Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor

**Total**

**Anggaran**

Rp. 3.000.000.000,-

**Rp. 3.000.000.000,-\***  
(Tiga Miliar Rupiah)

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan  
dan Ekonomi Digital,

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan  
dan Pengembangan Ekspor



**Ali Murtopo Simbolon**



**Ekko Harjanto**